

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adam Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.

Andi hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Darwin Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.

Elwi Danil, 2011, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Henrol Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendektan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta

Jimly Assihiddiqie, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.

Leden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi (Masalah dan Pemecahannya) Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta .

M.A. Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Banding, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Maria S W. Sumarjono, 2012, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.

Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2017, *Hukum Keuangan Negara : Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rosa Agustina Dkk, 2012, *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*, Pustaka Larasan, Bali.

Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim H.S dan Erlies Setiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Seoekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta.

Yahman, 2014, *karakteristik Wanprestasi dan tindak pidana penipuan: yang lahir dari hubungan kontraktual*, Pradamedia Group, Jakarta.

Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuann Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang ,Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

### **C. Internet/ Hasil Penelitian**

Jekson Kasehung, 2015, *Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal, Universitas Sam Ratulangi

Kelik pramudya, 17 september 2008, *Putusan Bebas (vrijspraak)*, diakses pada 10 januari 2020.

Linda Septriana S, 2014, *Peranan Aparat Kejaksaan Dalam Upaya Penyelamatan Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Terdakwanya Meninggal Dunia*. Universitas Bengkulu.

- M. Fatria, 2018, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Penentuan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Andalas.
- Sinnggih Herwibowo, 2016, *Problematika Gugatan Perdata Oleh Pengacara Negara Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta